	Universitas Negeri Surabaya **S1 Pendidikan IPS**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pendidikan Politik dan Antikorupsi	8420703132		3		30 Agustus 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
			NUANSA BAYU SEGARA

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Pendidikan Politik dan Antikorupsi (8420703132) dirancang untuk membekali mahasiswa S1 Pendidikan IPS dengan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme sistem politik, dinamika demokrasi, serta urgensi integritas dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Fokus utama pembelajaran ini adalah membentuk karakter calon pendidik yang memiliki kesadaran politik yang kritis sekaligus komitmen moral yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi. Ruang lingkup materi mencakup teori politik dasar, hak dan kewajiban warga negara, tipologi korupsi, instrumen hukum pemberantasan korupsi, serta strategi internalisasi nilai-nilai antikorupsi. Melalui metode pembelajaran aktif seperti diskusi kolaboratif, studi kasus, dan penugasan berbasis proyek, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis fenomena sosiopolitik secara objektif dan solutif. Mata kuliah ini memiliki relevansi strategis bagi program studi Pendidikan IPS dalam menghasilkan tenaga pendidik yang mampu mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan yang berintegritas ke dalam kurikulum pendidikan ilmu sosial di sekolah.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-5	Menguasai struktur keilmuan, konsep dan teori disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai landasan dalam mengorganisasikan konten-konten pembelajaran IPS yang bermuatan kearifan lokal.
CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dan etika akademik sebagai dasar pembentukan karakter integritas dalam konteks kehidupan politik dan upaya pencegahan korupsi.
CPMK-2	Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan budaya nasional dalam mengembangkan partisipasi politik yang demokratis, bersih, dan berintegritas sebagai pendidik IPS.
CPMK-3	Menganalisis konsep, teori, dan struktur keilmuan politik serta integritas sebagai landasan utama dalam pendidikan politik dan antikorupsi.
CPMK-4	Mengorganisasikan konten pembelajaran IPS yang mengintegrasikan materi pendidikan politik dan antikorupsi secara sistematis.
CPMK-5	Menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam konten pendidikan politik dan antikorupsi pada pembelajaran IPS.
CPMK-6	Mampu menginternalisasi nilai-nilai inklusivitas dan kesadaran belajar sepanjang hayat dalam menganalisis dinamika politik nasional untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis.
CPMK-7	Menunjukkan karakter tangguh dan kemampuan kolaboratif dalam mengonsepkan serta mengimplementasikan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
CPMK-8	Mampu merancang inovasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang adaptif dan kreatif dalam menyajikan materi pendidikan politik dan antikorupsi bagi peserta didik.
CPMK-9	Mengintegrasikan jiwa kewirausahaan sosial dalam memelopori gerakan literasi politik dan budaya antikorupsi sebagai solusi kreatif atas permasalahan bangsa.

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-5	CPL-2
CPMK-1	✔			
CPMK-2	✔			
CPMK-3			✔	
CPMK-4			✔	
CPMK-5			✔	
CPMK-6				✔
CPMK-7				✔
CPMK-8				✔
CPMK-9				✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1				✔												
CPMK-2					✔						✔					
CPMK-3	✔	✔														
CPMK-4								✔	✔							
CPMK-5						✔										
CPMK-6			✔				✔						✔			
CPMK-7														✔		
CPMK-8										✔		✔				
CPMK-9															✔	✔

Pustaka

Utama :

1. Handoyo, Eko. 2021. Pendidikan Antikorupsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
2. Haryono. 2020. Pendidikan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
3. Suyato. 2023. Pendidikan Politik dalam Perspektif Pendidikan IPS. Yogyakarta: UNY Press.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2022. Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: KPK.

Pendukung :

1. Spady, William G. 2021. Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers. Arlington: American Association of School Administrators.
2. Darmadi, Hamid. 2019. Pengantar Pendidikan Politik. Bandung: Alfabeta.
3. Syamsuddin, Alamsyah. 2020. Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Pendidikan. Makassar: Sah Media.
4. Sulasmono, Bambang S. 2022. Pembelajaran IPS Berbasis Masalah Sosial Kontemporer. Salatiga: Satya Wacana University Press.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan konsep dasar kekuasaan, demokrasi, dan sistem politik dalam perspektif ilmu sosial.	1. Ketepatan dalam mendefinisikan konsep kekuasaan serta mengidentifikasi sumber-sumber kekuasaan menurut para ahli ilmu sosial. 2. Ketepatan dalam menjelaskan prinsip utama demokrasi dan relevansinya dalam membatasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). 3. Ketepatan dalam menguraikan mekanisme kerja sistem politik serta keterkaitan antar subsistem di dalamnya secara sistematis.	Kriteria: Ketepatan konseptual, kedalaman analisis, dan kejelasan argumentasi. Bentuk: Tes tertulis objektif (pilihan ganda) dan rubrik penilaian partisipasi diskusi.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (Small Group Discussion), dan Contextual Instruction.	1. Menyusun ringkasan (summary) mengenai keterkaitan antara konsentrasi kekuasaan dengan potensi perilaku koruptif melalui Learning Management System (LMS). 2. Mengerjakan kuis daring mengenai klasifikasi sistem politik dan implementasi nilai demokrasi di Indonesia.	1. Definisi, sumber, dan dimensi kekuasaan dalam perspektif sosiologi politik. 2. Teori demokrasi, nilai-nilai demokratis, dan mekanisme pembatasan kekuasaan. 3. Komponen sistem politik (input, proses, output) dan interaksinya dengan lingkungan sosial.	5%
2	Menguraikan teori-teori penyebab korupsi serta dampaknya terhadap tatanan sosial dan ekonomi.	1. Ketepatan dalam menguraikan dan membedakan berbagai teori penyebab korupsi. 2. Kemampuan dalam memetakan korelasi antara praktik korupsi dengan kerusakan tatanan sosial dan ekonomi secara sistematis.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kedalaman analisis, dan sistematika berpikir. Bentuk: Tes tertulis (kuis) dan ringkasan eksekutif.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan Case-Based Learning.	1. Membuat peta konsep (mind map) yang menghubungkan satu teori penyebab korupsi dengan fenomena sosial di Indonesia. 2. Menyusun esai singkat mengenai analisis dampak ekonomi dari salah satu kasus korupsi besar yang pernah terjadi di tingkat nasional.	1. Teori-teori penyebab korupsi (Teori GONE, CDMA, Fraud Triangle, dan perspektif sosiologis). 2. Dampak korupsi terhadap tatanan sosial (kemiskinan, ketimpangan) dan ekonomi (investasi, utang negara).	5%
3	Menganalisis sistem dan struktur politik di Indonesia dengan perspektif inklusif terhadap keberagaman sosial dan budaya.	1. Ketepatan dalam menguraikan fungsi serta relasi antarlembaga negara dalam konteks struktur politik nasional. 2. Kemampuan menganalisis pengaruh sistem keterwakilan politik terhadap aksesibilitas kelompok beragam dalam pemerintahan. 3. Ketajaman analisis terhadap kebijakan politik yang mendukung pengakuan dan perlindungan keragaman sosial-budaya di Indonesia.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kedalaman analisis kritis, dan relevansi argumen terhadap nilai inklusivitas. Bentuk: Tes tertulis (uraian) dan presentasi analisis studi kasus.	Case-Based Method (CBM) melalui diskusi kelompok terfokus untuk membedah dinamika politik inklusif di Indonesia.	1. Menyusun esai analisis mengenai efektivitas keterwakilan kelompok minoritas di lembaga legislatif yang diunggah melalui Learning Management System (LMS). 2. Partisipasi aktif dalam forum diskusi daring mengenai tantangan penerapan politik inklusif dalam struktur birokrasi daerah.	1. Struktur lembaga negara dan dinamika pembagian kekuasaan dalam sistem politik Indonesia. 2. Sistem pemilu dan mekanisme representasi politik bagi kelompok minoritas, perempuan, dan keberagaman budaya. 3. Analisis kebijakan publik inklusif dalam bingkai penguatan integrasi nasional dan keberagaman sosial.	5%

4	Menjelaskan korelasi antara nilai-nilai moralitas agama dengan integritas diri dalam mencegah praktik korupsi.	1. Ketepatan dalam menjelaskan definisi dan substansi moralitas serta etika agama terkait pelarangan praktik korupsi. 2. Kemampuan menganalisis proses pembentukan integritas diri yang bersumber dari internalisasi nilai-nilai spiritual. 3. Ketepatan dalam mengidentifikasi peran nyata ajaran agama dalam memitigasi risiko tindakan korupsi pada level individu dan sosial.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, ketajaman analisis hubungan antarvariabel, dan keruntutan logika berpikir. Bentuk: Tes tertulis (uraian) dan penilaian kinerja pada sesi diskusi kelompok.	Problem-Based Learning (PBL) yang dikombinasikan dengan metode ceramah serta diskusi kelompok terfokus.	1. Menyusun resume mengenai korelasi nilai agama dan integritas diri berdasarkan literatur ilmiah yang diunggah pada Learning Management System (LMS). 2. Partisipasi aktif dalam forum diskusi daring mengenai studi kasus tokoh yang menjaga integritas berdasarkan prinsip moralitas agama.	1. Hakikat moralitas dan etika dalam perspektif berbagai agama terhadap perilaku korupsi. 2. Konstruksi integritas diri melalui internalisasi nilai-nilai spiritual dan religiositas. 3. Studi komparatif peran institusi dan ajaran agama dalam membentuk perilaku antikorupsi di masyarakat.	5%
5	Menguraikan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang mendukung penguatan budaya antikorupsi di lingkungan masyarakat.	1. Ketepatan dalam menguraikan hubungan setiap sila Pancasila dengan pembentukan karakter individu yang berintegritas dan antikorupsi. 2. Kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan relevansi nilai-nilai kearifan lokal tertentu terhadap penguatan budaya hukum dan kejujuran di masyarakat.	Kriteria: Ketepatan analisis, kedalaman argumentasi, dan kesesuaian kontekstual. Bentuk: Penulisan esai reflektif dan diskusi kelompok terpumpun.	Case-Based Method (Metode Studi Kasus) dan diskusi kolaboratif.	1. Melakukan observasi digital dan menyusun ulasan singkat mengenai satu tradisi lokal yang mendukung nilai kejujuran pada forum diskusi di LMS. 2. Membuat materi kampanye kreatif berupa infografis yang mengolaborasikan nilai Pancasila dengan kearifan lokal dalam melawan korupsi untuk diunggah ke media sosial.	1. Nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etika dan integritas nasional dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. 2. Ragam kearifan lokal Nusantara yang mempromosikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan budaya malu sebagai instrumen sosial antikorupsi.	5%
6	Menganalisis relevansi praktik budaya lokal dalam upaya pencegahan perilaku koruptif di lingkungan sosial.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan penguatan integritas diri dan sosial. 2. Kedalaman analisis dalam menghubungkan relevansi praktik budaya tertentu dengan efektivitas pencegahan perilaku koruptif di lingkungan sosial.	Kriteria: Ketajaman analisis, orisinalitas gagasan, dan ketepatan argumentasi dalam menghubungkan budaya dengan teori antikorupsi. Bentuk: Penulisan artikel opini/esai kritis dan presentasi hasil diskusi kelompok.	Case-Based Method (CBM) yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok terfokus dan ceramah interaktif.	1. Melakukan observasi digital atau studi literatur mengenai satu praktik budaya lokal, kemudian mengunggah laporannya ke Learning Management System (LMS). 2. Berpartisipasi aktif dalam forum diskusi asinkron di LMS dengan menanggapi studi kasus tentang pergeseran nilai budaya lokal akibat pengaruh korupsi sistemik.	1. Konsep kearifan lokal (local wisdom) dan nilai-nilai integritas tradisional di berbagai daerah (seperti: Siri' na Pacce, Paja, Maja Labo Dahu, atau Gotong Royong). 2. Analisis komparatif dan sinkronisasi antara praktik budaya lokal dengan prinsip-prinsip antikorupsi modern dalam kehidupan bermasyarakat.	5%
7	Mengaitkan prinsip demokrasi dengan penguatan karakter individu yang terbuka dan menghargai perbedaan pendapat.	1. Ketepatan dalam menjabarkan relevansi prinsip demokrasi terhadap pembentukan sikap terbuka dan inklusif pada individu. 2. Kemampuan mengaitkan urgensi sikap menghargai perbedaan pendapat dengan upaya pencegahan tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang.	Kriteria: Ketepatan analisis, kedalaman argumentasi, dan konsistensi logika berpikir. Bentuk: Analisis studi kasus dan penilaian partisipasi diskusi kelas.	Case-Based Method (CBM) dan diskusi kelompok terstruktur.	1. Menyusun esai kritis di Learning Management System (LMS) mengenai peran budaya apresiasi pendapat dalam meminimalisir praktik gratifikasi di lingkungan publik. 2. Melakukan telaah literatur secara asinkron mengenai pengaruh pendidikan politik terhadap tingkat toleransi individu dalam masyarakat plural.	1. Prinsip-prinsip dasar demokrasi dan nilai-nilai kewargaan (civic values) dalam penguatan karakter. 2. Korelasi keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat dengan integritas personal untuk mencegah perilaku koruptif.	5%
8	UTS	1. Ketepatan dalam menjelaskan definisi politik dan mekanisme perolehan kekuasaan. 2. Ketepatan dalam menganalisis fungsi lembaga politik dan implementasi demokrasi di Indonesia. 3. Ketepatan dalam mengidentifikasi berbagai modus operandi korupsi dan akar penyebabnya. 4. Ketepatan dalam menguraikan penerapan nilai integritas untuk mencegah perilaku koruptif.	Kriteria: Ketepatan jawaban, kedalaman analisis, orisinalitas pemikiran, dan kejujuran akademik. Bentuk: Tes tertulis (Ujian Tengah Semester).	Evaluasi sumatif melalui pengerjaan soal ujian secara mandiri dalam durasi waktu terbatas.	1. Mengakses soal ujian melalui platform Learning Management System (LMS) sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Mengunggah lembar jawaban dalam format PDF ke sistem LMS dengan mengikuti aturan penamaan file yang berlaku.	1. Konsep dasar, ruang lingkup politik, dan teori kekuasaan. 2. Struktur dan dinamika sistem politik serta demokrasi di Indonesia. 3. Definisi, tipologi, dan faktor-faktor penyebab korupsi. 4. Nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam sektor publik.	25%

9	Mendesain perangkat pembelajaran IPS yang mampu mentransformasikan konsep politik dan antikorupsi ke dalam lingkup persekolahan.	1. Ketepatan memetakan kompetensi dasar IPS yang relevan dengan nilai-nilai politik dan antikorupsi. 2. Kesesuaian pemilihan bahan ajar dan media dalam mentransformasikan konsep antikorupsi ke tingkat sekolah. 3. Kemampuan menyusun instrumen penilaian otentik yang valid untuk mengukur capaian pembelajaran politik dan antikorupsi.	Kriteria: Ketepatan integrasi konten, orisinalitas desain, kelogisan alur pembelajaran, dan kelengkapan komponen perangkat. Bentuk: Portofolio perangkat pembelajaran (RPP/Modul Ajar) dan Rubrik Penilaian Produk.	Project-Based Learning (PjBL) yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan draf, diskusi kelompok terpumpun, dan finalisasi perangkat pembelajaran.	1. Mengunggah hasil pemetaan kompetensi kurikulum IPS dan draf awal perangkat pembelajaran ke Learning Management System (LMS). 2. Melakukan review sejawat (peer-review) terhadap desain perangkat pembelajaran yang disusun oleh mahasiswa lain melalui forum diskusi online.	1. Analisis integrasi nilai politik dan antikorupsi dalam kurikulum IPS persekolahan. 2. Pengembangan bahan ajar dan media IPS berbasis nilai-nilai antikorupsi. 3. Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran IPS yang mengukur sikap politik dan perilaku antikorupsi.	5%
10	Mengembangkan media atau model pembelajaran politik dan antikorupsi yang inovatif berbasis teknologi digital sesuai perkembangan zaman.	1. Ketepatan dalam mengklasifikasikan jenis media digital yang relevan dengan target audiens pendidikan politik dan antikorupsi. 2. Kualitas estetika dan komunikatif dalam memvisualisasikan materi nilai-nilai integritas ke dalam format digital. 3. Keandalan fungsional dan inovasi fitur dalam prototipe media pembelajaran yang dikembangkan.	Kriteria: Ketepatan teknis, kreativitas desain, orisinalitas konten, dan kesesuaian media dengan tujuan instruksional. Bentuk: Proyek pengembangan media (Project-based assessment) dan presentasi produk.	Project-Based Learning (PjBL) yang mencakup diskusi kelompok, lokakarya mandiri (asynchronous), dan simulasi penggunaan media.	1. Menyusun storyboard atau rancangan alur media pembelajaran digital pada platform kolaborasi daring. 2. Mengunggah video demonstrasi penggunaan media atau tautan prototipe aplikasi ke dalam Learning Management System (LMS).	1. Tipologi dan tren media pembelajaran digital dalam pendidikan politik serta antikorupsi. 2. Strategi desain pesan dan visualisasi konten nilai-nilai integritas melalui multimedia interaktif. 3. Teknik implementasi alat digital (gamifikasi, aplikasi mobile, atau media sosial) untuk simulasi perilaku antikorupsi.	5%
11	Merancang strategi pembelajaran IPS yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan perilaku antikorupsi pada peserta didik.	1. Ketepatan dalam menganalisis model integrasi nilai kebangsaan yang sesuai dengan struktur kurikulum IPS. 2. Kemampuan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang menstimulasi kesadaran politik peserta didik secara sistematis. 3. Ketepatan dalam merancang materi dan media ajar antikorupsi yang berbasis pada kasus nyata di lingkungan sosial.	Kriteria: Ketepatan analisis, orisinalitas rancangan strategi, kesesuaian metode dengan nilai yang diintegrasikan, dan kelengkapan komponen perangkat pembelajaran. Bentuk: Proyek (Penyusunan Modul Ajar/RPP) dan Presentasi.	Project-Based Learning (PjBL) melalui diskusi kelompok, simulasi rancangan pembelajaran, dan bedah kurikulum.	1. Melakukan analisis kritis terhadap video praktik pembelajaran IPS di platform daring untuk mengidentifikasi celah integrasi nilai kebangsaan dan antikorupsi. 2. Mengunggah draf rancangan strategi pembelajaran ke Learning Management System (LMS) untuk mendapatkan umpan balik dari dosen dan rekan sejawat (peer-review).	1. Model-model integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum IPS. 2. Strategi internalisasi nilai kesadaran politik melalui metode pembelajaran aktif (Active Learning). 3. Pengembangan materi ajar pendidikan antikorupsi berbasis studi kasus dalam konteks IPS.	5%
12	Menunjukkan kemampuan adaptasi dalam mensimulasikan praktik pengajaran materi politik yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa.	1. Ketepatan dalam menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan skenario dinamika kelas yang diberikan. 2. Kemampuan menyisipkan pesan penguatan karakter dalam konten materi politik secara relevan. 3. Kualitas performansi dalam mensimulasikan praktik mengajar yang interaktif dan adaptif terhadap situasi kelas.	Kriteria: Ketepatan metodologi, kesesuaian nilai karakter dengan materi, dan kelancaran simulasi. Bentuk: Praktik (Micro-teaching) dan rubrik penilaian unjuk kerja.	Simulasi, Role Play, dan Case Method.	1. Mengunggah rancangan skenario simulasi pengajaran (RPP) yang telah mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke sistem informasi akademik. 2. Melakukan evaluasi sejawat (peer-assessment) melalui forum diskusi online terhadap video rekaman simulasi yang dilakukan rekan mahasiswa.	1. Strategi pedagogi adaptif dalam penyampaian materi politik di tingkat sekolah. 2. Teknik integrasi nilai karakter (integritas, tanggung jawab, dan keadilan) dalam kurikulum pendidikan politik. 3. Metode simulasi micro-teaching yang berorientasi pada respons dan partisipasi aktif siswa.	5%
13	Mengevaluasi peran partisipasi politik warga negara sebagai perwujudan sikap belajar sepanjang hayat dalam menghadapi perubahan sistemik.	1. Ketepatan dalam menganalisis korelasi antara dinamika partisipasi politik dengan respon terhadap perubahan sistemik. 2. Kemampuan menghubungkan konsep belajar sepanjang hayat dengan peningkatan kualitas keterlibatan politik yang etis. 3. Ketajaman dalam mengevaluasi peran strategis warga negara dalam mengawal sistem birokrasi yang bersih dari korupsi.	Kriteria: Ketajaman analisis kritis, kedalaman argumentasi, dan ketepatan penggunaan teori dalam konteks perubahan sistemik. Bentuk: Makalah analisis studi kasus dan rubrik penilaian diskusi.	Case-Based Method (CBM) melalui diskusi kelompok terfokus dan presentasi hasil evaluasi kebijakan.	1. Melakukan telaah kritis terhadap jurnal mengenai efektivitas partisipasi digital dalam perubahan kebijakan publik. 2. Menyusun esai reflektif mengenai relevansi literasi antikorupsi sebagai proses belajar berkelanjutan bagi pemilih muda.	1. Dinamika partisipasi politik dan pengaruhnya terhadap perubahan sistemik di era digital. 2. Integrasi prinsip belajar sepanjang hayat dalam pengembangan literasi politik dan etika warga negara. 3. Strategi evaluasi dampak partisipasi aktif masyarakat terhadap efektivitas kebijakan antikorupsi.	5%

14	Merancang program aksi kolaboratif dalam gerakan antikorupsi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan kampus atau masyarakat.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan memetakan peran serta fungsi pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dalam gerakan antikorupsi. 2. Kualitas rancangan program aksi yang mencakup tujuan, mekanisme kolaborasi, dan rencana implementasi yang realistis.	Kriteria: Ketepatan analisis stakeholder, orisinalitas ide program, dan kelayakan implementasi rencana aksi. Bentuk: Penilaian proyek (Proposal Program Aksi) dan presentasi rencana kolaborasi.	Project-Based Learning (PjBL) yang mencakup diskusi kelompok, simulasi pemetaan stakeholder, dan bimbingan penyusunan proposal aksi.	1. Melakukan observasi digital terhadap isu korupsi lokal dan mengunggah hasil identifikasi masalah ke Learning Management System (LMS). 2. Mengunggah draf proposal program aksi kolaboratif untuk mendapatkan umpan balik sejawat (peer-review) melalui forum diskusi daring.	1. Konsep dan model kolaborasi multi-stakeholder dalam gerakan antikorupsi. 2. Teknik penyusunan proposal program aksi dan strategi mobilisasi sumber daya di lingkungan kampus/masyarakat.	5%
15	Mengelola proyek kemahasiswaan yang mandiri, inovatif, dan berorientasi solusi terhadap pencegahan korupsi di tingkat komunitas.	1. Kemampuan menyusun rencana proyek (proposal) yang logis, sistematis, dan terukur. 2. Tingkat inovasi dan orisinalitas dalam merumuskan solusi pencegahan korupsi yang sesuai dengan karakteristik komunitas. 3. Ketepatan dalam menganalisis hasil pelaksanaan proyek dan menyusun laporan evaluasi yang akuntabel.	Kriteria: Ketepatan perencanaan, kreativitas solusi, kemandirian dalam pengelolaan, dan efektivitas dampak proyek. Bentuk: Penilaian proyek (Project-based assessment), portofolio kegiatan, dan presentasi laporan akhir.	Project-Based Learning (PjBL) yang mencakup diskusi kelompok terfokus, asistensi/mentoring proyek, dan praktikum lapangan.	1. Mengunggah rancangan proposal proyek dan timeline kegiatan pada sistem manajemen pembelajaran (LMS). 2. Mengunggah laporan akhir proyek beserta video dokumentasi aksi komunitas ke repositori daring atau media sosial sebagai sarana kampanye.	1. Manajemen Strategis Proyek Antikorupsi: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Penjadwalan Aksi. 2. Metode Inovasi Sosial dan Desain Kampanye Edukasi Antikorupsi Kreatif di Masyarakat. 3. Instrumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Dampak Proyek Sosial Antikorupsi.	5%
16	UAS	1. Ketepatan dalam merumuskan rencana aksi kampanye antikorupsi yang menunjukkan peran kepemimpinan secara mandiri. 2. Keberhasilan dalam mengidentifikasi serta mengorganisasi mitra strategis dalam pembentukan jejaring sosial antikorupsi.	Kriteria: Orisinalitas rencana aksi, efektivitas strategi kemitraan, dan kelayakan keberlanjutan program. Bentuk: Penilaian proyek (project-based learning) dan portofolio pengembangan jejaring.	Project-Based Learning (PjBL) yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok kolaboratif.	1. Penyusunan proposal kampanye antikorupsi digital yang melibatkan minimal tiga entitas atau komunitas sebagai mitra jejaring. 2. Pembuatan laporan progres interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka membangun aliansi antikorupsi.	1. Kepemimpinan dan inisiatif dalam gerakan sosial antikorupsi. 2. Strategi membangun dan mengelola jejaring sosial (networking) untuk kampanye berkelanjutan.	25%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.